



BANYAK TERNAK TERKENA PMK

Keberadaan Penjual 'Tiban' Diperketat

YOGYA (KR) - Meski penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terus meluas, lalu lintas hewan ternak di DIY tidak dihentikan sepenuhnya. Hewan ternak dari daerah yang tidak terjangkau PMK masih diperbolehkan masuk DIY dengan catatan harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

Persyaratan berkaitan dengan surat sehat itu menjadi suatu keharusan untuk memastikan ternak yang masuk ke DIY kondisinya benar-benar sehat. Tidak hanya itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY bersama Satgas khusus dan kabupaten/kota juga aktif melakukan pengawasan lalu lintas keluar masuk hewan di daerah perbatasan. "Memang jumlah ternak yang terpapar PMK memang semakin banyak. Walaupun begitu lalu lintas

ternak tidak langsung berhenti total tapi tetap berjalan sesuai protap yang ditentukan, misalnya hewan yang masuk wajib memiliki SKKH. Kalau wabah PMK tidak kunjung tertangani dikhawatirkan bisa mempengaruhi ketersediaan hewan ternak saat momen Idul Adha," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Sugeng Purwanto di Yogyakarta, Rabu (15/6).

Seperti data di Kementerian Pertanian RI mencatat ada 3.120 hewan ter-

nak di wilayah DIY yang terjangkau PMK sampai Selasa (14/6). Sugeng mengatakan, kondisi normal atau tidak ada wabah PMK sebenarnya kebutuhan hewan kurban di DIY selalu mengalami kekurangan karena permintaan rata-rata naik dari 10 hingga 20 persen.

Namun kebutuhan tersebut tetap dapat terpenuhi dengan adanya penjual hewan kurban tiban atau dadakan. Tapi seiring dengan masih merebaknya penyakit PMK, Pemda DIY akan memperketat keber-

adaan penjual hewan kurban tiban tersebut. Adanya pengetatan itu secara otomatis akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hewan ternak untuk Idul Adha.

Walaupun begitu pihaknya optimis PMK tidak akan terlalu berdampak pada pemenuhan kebutuhan hewan kurban. Sebab tingkat fatalitas penyakit tersebut sangatlah rendah. Apalagi DIY masih memiliki puluhan ribu stok hewan ternak. "Sejumlah upaya terus kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban dan memastikan ternak yang masuk ke DIY kondisinya sehat," ujarnya.

Menurut Sugeng, tingginya penularan PMK

disebabkan karena hewan ternak yang berstatus suspek atau dicurigai tapi dianggap dan ditangani layaknya hewan terpapar PMK. Tindakan itu dilakukan guna meminimalisir adanya penularan di ternak tersebut.

"Memang kalau dilihat dari model penanganan itu membuat angka menjadi besar. Karena ada aturan, misalnya di kandang itu ada 50 ternak lalu ada satu ekor yang kena PMK, yang dilaporkan bukan satu tapi 50. Padahal yang 49 bisa jadi sembuh nantinya. Semua itu dilakukan untuk memastikan kesehatan ternak dan mencegah kemungkinan terjadinya penularan," tambahnya. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005